



KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUKUM, ADVOKASI, DAN PENGAWASAN REGULASI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
KELOMPOK KERJA KAJIAN KEBIJAKAN DAN REGULASI
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG HUKUM, ADVOKASI, DAN PENGAWASAN REGULASI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi terhadap Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Pancasila, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kelompok Kerja Kajian Kebijakan dan Regulasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi terhadap Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1106);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 814);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM, ADVOKASI, DAN PENGAWASAN REGULASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG KELOMPOK KERJA KAJIAN KEBIJAKAN DAN REGULASI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2023.

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kajian Kebijakan dan Regulasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Pengarah, Penanggung jawab, Ketua, dan Anggota.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan kajian terhadap kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan Pancasila meliputi tahapan:
- a. identifikasi dan verifikasi terhadap kebijakan dan regulasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila;
 - b. pendalaman materi terhadap hasil identifikasi dan verifikasi terhadap kebijakan dan regulasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila; dan
 - c. penyusunan laporan kajian terhadap kebijakan dan regulasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Deputy Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi setiap 2 (dua) bulan sekali.
- KELIMA : Masa tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak bulan April s.d. September 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2023

DEPUTI BIDANG HUKUM, ADVOKASI,
DAN PENGAWASAN REGULASI,




KEMAS AKHMAD TAJUDDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM,
 ADVOKASI, DAN PENGAWASAN REGULASI
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG KELOMPOK KERJA KAJIAN
 KEBIJAKAN DAN REGULASI BIDANG POLITIK,
 HUKUM, DAN KEAMANAN BADAN PEMBINAAN
 IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2023

KELOMPOK KERJA KAJIAN KEBIJAKAN DAN REGULASI
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kemas Akhmad Tajuddin, S.H., M.H.	Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi, BPIP	Pengarah
2.	Drs. R.D.M. Johan Johor Mulyadi, M.H.	Direktur Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi, BPIP	Penanggung Jawab
3.	Jackson Simamora, S.H., M.Si., QIA., CRMP.	Analisis Hukum Ahli Madya, BPIP	Ketua
4.	Tri Budi Haryoko, A.Md.IP., S.H., M.H.	Analisis Hukum Ahli Madya, BPIP	Sekretaris
5.	Fortina Rudiyantri, S.H.	Analisis Resosialisasi dan Rehabilitasi, BPIP	Anggota
6.	Mella Yoanita, S.Sos.	Analisis Resosialisasi dan Rehabilitasi, BPIP	Anggota
7.	Eska Pratiwi, S.H.	Analisis Resosialisasi dan Rehabilitasi, BPIP	Anggota
8.	Erlangga Aryanindra Saputra, S.H.	Analisis Legislasi, BPIP	Anggota
9.	Phillipus Jans Martuah, S.H.	Analisis Legislasi, BPIP	Anggota
10.	Sahroni Leonardo Rajagukguk, S.H.	Analisis Legislasi, BPIP	Anggota
11.	Tongam Renikson Silaban, S.H., M.H.	Analisis Hukum Ahli Madya, BPHN	Anggota
12.	Rusdiyanto Muin, S.H., M.H.	Analisis Hukum Ahli Madya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan	Anggota
13.	Hafiel Nurjaman	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat	Anggota
14.	Nurhayati, S.H., M.H.	Analisis Hukum Ahli Madya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau	Anggota
15.	Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.	Akademisi, Universitas Hasanuddin	Ketua Pengkaji Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang

			Pelaksanaan Pengangkatan anak
16.	Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.	Akademisi, Universitas Hasanuddin	Pengkaji
17.	Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.	Akademisi, Universitas Hasanuddin	Pengkaji
18.	Ahsan Yunus, S.H., M.H.	Akademisi, Universitas Hasanuddin	Pengkaji
19.	Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.I.P., S.H., M.H., M.Si	Akademisi, Universitas Pendidikan Indonesia	Ketua Pengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
20.	Dr. Saifullah, S.Pd., M.Si.	Akademisi, Universitas Pendidikan Indonesia	Pengkaji
21.	Dr. Asep Mahpudz, M.Si.	Akademisi, Universitas Pendidikan Indonesia	Pengkaji
22.	Sri Wahyuni Tanszil, M.Pd.	Akademisi, Universitas Pendidikan Indonesia	Pengkaji
23.	Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H.	Akademisi, Universitas Riau	Ketua Pengkaji Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
24.	Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H.	Akademisi, Universitas Riau	Pengkaji
25.	Haryono, S.Pd., M.Pd.	Akademisi Universitas Riau	Pengkaji
26.	Muhammad Zulhidayat, S.H., M.H.	Akademisi, Universitas Riau	Pengkaji

DEPUTI BIDANG HUKUM, ADVOKASI,
DAN PENGAWASAN REGULASI,



KEMAS AKHMAD TAJUDDIN